



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SUPRIYONO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1
3. NHK : 459342

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.205.568.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 196.646.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/60 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 297.792.000
3. Tanah Seluas 305 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 431.880.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 279.250.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 147.500.000

1. MOBIL, Toyota Innova/ Minibus Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOBIL, Toyota Agya/ Minibus Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 63.000.000
3. MOTOR, Honda Beat/ Solo Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.750.000
4. MOTOR, Honda Vario/ Solo Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.750.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 23.750.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 161.505.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.538.323.000



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.538.323.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.